

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Juli 2024 mengalami Deflasi sebesar -0,29% (mtm). Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. Juli 2024 sebesar 0,35% dan Inflasi tahunan sebesar 1,87% (yoy). Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya Deflasi bulan Juli 2024 di Sumatera Selatan antara lain: dari komoditi makanan/pangan: daging ayam ras dan cabai sedangkan andil inflasi bulanan (mtom) antara lain; beras, cabe rawit, kopi bubuk dan kentang. Non makanan: bimbel, emas perhiasan, tariff bidan, tas sekolah dan taman kanak-kanan. Komoditi andil inflasi tahunan (yoy) antara lain: makanan: Beras, dan rokok kretek filter. Non Makanan: bensin dan emas perhiasan.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2024 mengalami deflasi sebesar -0,19% (mtm). Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. Agustus 2024 sebesar 0,16% dan Inflasi tahunan sebesar 1.80% (yoy). Deflasi Bulanan disebabkan oleh beberapa komoditi yang dominan yaitu dari makanan/pangan: bawang merah, daging ayam ras, jeruk, telur ayam ras dan cabe rawit. Sedangkan Inflasi tahunan didominasi komoditi makanan antara lain; beras, gula pasir, Cabe merah dan rawit, rokok kretek filter, non makanan: bensin.
3. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan September 2024 masih mengalami deflasi sebesar -0,12%. Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Septembet 2024 sebesar 0,04%. Sementara Inflasi Tahunan "Year on Year" (September 2024 terhadap September 2024) sebesar 1,40%. Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya deflasi bulan September 2024 (mtm) antara lain; dari makanan/pangan: cabe merah, cabe rawit, telur ayam ras, tomat, kentang, ikan gabus, wortel, semangka dan ikan dencis. Non Makanan; Bensin. Sedangkan Komoditi yang dominan menyebabkan inflasi tahunan (yoy) antara lain dari makanan: gula pasir, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, bawang putih dan beras. Dan dari Non makanan antara lain: emas perhiasan, tariff air minum PDAM, listrik dan bahan bakar rumah tangga, mobil, pemeliharaan/servis.
4. Tingkat Inflasi daerah IHK di Wilayah Sumatera Selatan untuk bulan April, Mei dan Juni 2024, sebagai berikut:

BULAN	TINGKAT INFLASI KOTA PALEMBANG (%)		TINGKAT INFLASI KOTA LUBUK LINGGAU (%)		TINGKAT INFLASI KAB MUARA ENIM (%)		TINGKAT INFLASI KAB OKI (%)		TINGKAT INFLASI PROVINSI SUMATERA SELATAN (%)	
	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)
JULI	-0,31	2,09	-0,31	1,45	-0,07	1,04	-0,42	1,78	-0,29	1,87
AGUSTUS	-0,24	1,85	-0,24	1,31	0,24	1,51	-0,18	1,95	-0,19	1,80
SEPTEMBER	-0,13	1,41	-0,06	1,11	-0,02	1,08	-0,16	1,72	-0,12	1,40

Selama Triwulan III, tingkat inflasi di keempat kota IHK terkendali dengan baik dan sesuai dengan target capaian $2,5\% \pm 1\%$. Hanya perlu diperhatikan terhadap tingkat deflasi yang telah terjadi selama 3 (tiga) bulan hal ini perlu diperhatikan penyebabnya apakah adanya perubahan kecenderungan dari masyarakat, atau lemahnya daya beli masyarakat.

Meskipun di beberapa komoditi cenderung mengalami penurunan harga yaitu daging ayam ras, cabe, bawang merah, telur ayam ras, tidak berdampak terlalu signifikan terhadap inflasi, terjadi penurunan harga di beberapa komoditas mengakibatkan deflasi pada bulan juli, agustus dan September 2024, sedangkan Komoditi yang andil inflasi dalam triwulan III antara lain; Beras, bawang putih, rokok kretek filter mesin, mobil, services, dan Emas perhiasan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2024, ada beberapa komoditi yang dominan andil inflasi yaitu dari komoditi pangan adalah daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, telur, dan bawang putih, serta dari komoditi non pangan adalah Bensin, rokok dan emas perhiasan.

Kondisi El Nino berupa ancaman kekeringan akibat musim kemarau yang lebih panjang dan ekstrim masih sangat mempengaruhi walau di bulan September sudah mulai beransur intensitas adanya hujan. Kenaikan harga beras diakibatkan adanya penyesuaian harga di pasar akibat ketentuan HET terbaru komoditi Pangan Beras yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional.

HET terbaru dari Peraturan Badan Pangan Nasional No 5 tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024, menetapkan Harga beras Medium di daerah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebesar Rp. 12.500/kg, dan beras Premium Rp. 14.900/kg. Perkembangan harga beras perlu menjadi perhatian, meskipun dari Pemerintah Pusat telah melakukan Program Bantuan Pangan Beras gratis dan program beras SPHP namun di lapangan ditemukan bahwa harga beras diterima oleh konsumen akhir masih melebihi HET yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga Beras SPHP di pasaran belum dapat menunjukkan hasil yang baik dalam hal menekan harga beras.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Triwulan ke III, yaitu:

1. Keterjangkauan Harga melalui:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Kegiatan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa tempat di wilayah Kota Palembang.
2. Penyaluran Bantuan Pangan Beras telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap oleh Bulog, Tahap I dan Tahap II di tahun 2024 telah dilaksanakan 100% untuk bulan Januari s.d. Juni 2024, untuk tahap ke III baru untuk bulan Agustus dan telah 100% disalurkan, total sasaran/Penerima Bantuan Pangan (PBP) sebanyak 572.060 KK dengan alokasi 5.720 Ton per bulannya. Total pagu Bantuan Pangan Beras untuk Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 51.200 Ton. Untuk Beras SPHP Tahun 2024, Perum Bulog Wilayah Sumsel Babel menargetkan beras SPHP akan distribusikan ke seluruh wilayah Sumatera Selatan sebanyak 50.000 Ton. Per 28 September telah didistribusikan sebanyak 33.159.820 kg..
3. Pelaksanaan monitoring harga secara rutin ke pasar tradisional oleh TPID tingkat Provinsi (Dinas Perdagangan Pov. Sumsel, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, BI melalui SHP, maupun Kab / Kota.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menggelar Pasar Tani secara rutin setiap Rabu dan Jumat.

2. Ketersediaan Pasokan, melalui;

1. Optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan *Goes to School and Go to Office* menggiatkan kegiatan GSMP di perkantoran dan sekolah.. Pelaksanaan dilakukan di sekolah-sekolah SMA/SMK/MAN tersebar di 17 Kab/kota, karang taruna dan Pemerintah Daerah di 17 kab/kota. Sehubungan dengan adanya kegiatan GSMP award Go To School se Sumatera Selatan tahun 2024 yang penilaiannya dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2024, dan sampai dengan bulan September telah diberikan bantuan bibit dan benih tanaman cabai kepada SMA/SMK Se Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pelaksanaan sidak ketersediaan beras oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan, Satgas Pangan Polda, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Pemkot Palembang serta Dinas perdagangan Provinsi Sumsel.
3. Pengembangan lumbung pangan (food station) melalui peningkatan produksi pangan/hortikultura seperti pada komoditi padi, jagung, kedelai, bawang merah dan aneka cabe (cabe besar dan cabe rawit)
4. Optimalisasi pembiayaan pertanian, untuk penguatan kelembagaan (penyuluh) dan petani.

3. Kelancaran distribusi:

1. Penguatan KAD pelaksanaan penandatanganan Gubernur Sumatera Selatan dengan Bupati/Walikota di 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tanggal 21 Agustus 2024 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah. Agar menjamin hubungan antar daerah di Wilayah Sumatera Selatan tidak ada kendala berjalan dengan baik khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
2. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan menuju daerah centra produksi, food estate dan strategis.
3. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui peningkatan Sarana prasarana di Pelabuhan Tanjung Api-Api.
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi "Market Place Sibejajo".

4. Komunikasi yang efektif:

Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dalam hal Upaya pengendalian Inflasi Daerah melalui strategi Komunikasi yang Efektif, antara lain:

1. Pemantuan/koordinasi secara langsung di lapangan terhadap perkembangan kegiatan GSMP award Go To School se Sumatera Selatan tahun 2024.
2. Pelaksanaan Rakor, HLM dan Capacity Building TPID Provinsi, Kabupaten/kota Se Sumatera Selatan;
 1. Tanggal 4 juli 2024 dilaksanakan di Graha Bina Praja Sumatera Selatan Rakor HLM dilaksanakan dan dipimpin oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan Bpk Ellen Setiadi, S.H.,M.S.E. Pelaksanana Capacity Building dengan Narasumber Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
 2. Tanggal 23 juli 2024 Rakor dilaksanakan di Aryaduta Palembang Sumatera Selatan
- 4.

dibuka oleh Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Bpk Ir. Basaruddin Ahmad. Pembahasan Rencana Kerjasama Antar Daerah dan Rencana Publikasi Bersama Pasar Murah, dengan diharapkan keaktifan 17 kab/kota dan provinsi untuk mengisi link rencana OPM di tahun 2024.

3. Tanggal 2 Agustus 2024, HLM dipimpin oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan membahas upaya pengendalian inflasi daerah Sumatera Selatan dan pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan dan Capacity building pengendalian inflasi daerah.
 3. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis secara rutin oleh TPID Provinsi Sumsel.
 4. Rapat melalui Zoom Daerah-Daerah yang mengalami kenaikan harga (IPH) selama periode mingguan, berdasarkan laporan BPS Pusat sebagai tindak lanjut dari rakor dengan Kementerian Dalam Negeri RI.
 5. TPID Prov Sumsel secara rutin mengikuti zoom meeting bersama Rakornas Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri setiap minggunya dan giat melaksanakan Rapat koordinasi teknis TPID Provinsi Sumatera Selatan.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan ke III, beberapa evaluasi dari pelaksanaan kegiatan Upaya Pengendalian Inflasi Daerah, antara lain:

1. Upaya giat Program GSMP di Tahun 2024 agar tetap dilaksanakan, meningkatkan gerakan sumsel mandiri pangan di setiap daerah kabupaten/kota dan sangat mengharap dukungan dari pemerintah daerah untuk aktif menggerakkan masyarakatnya menanam tanaman pangan di sekitar permukiman, sekolah maupun perkantoran dan penyediaan bibit tanaman pangan serta aktif untuk mensosialisasikan budaya tanam.
 2. Kebijakan Pemerintah dalam melakukan Program Bantuan Pangan Murah dan telah menggelontorkan beras SPHP melalui pasar atau RPK/toko mitra bulog dalam rangka untuk menstabilkan harga beras sehingga harga beras tetap pada harga HET. Namun perlu bagi Bulog dan pemerintah di daerah untuk menindak tegas bagi mitra atau distributor yang melanggar ketentuan seperti halnya beras SPHP yang dijual kembali secara eceran (diubah dijual secara eceran dari beras yang dijual per 5 kg dalam 1 karung).
 3. Pemantuan terhadap harga pangan dan penyediaan bahan pangan yang terjangkau oleh masyarakat perlu terus untuk dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok yang terjangkau dan Antispasi terhadap kenaikan beras SPHP di awal bulan Mei 2024 dan tetap aktif melaksanakan sidak pasar atau ke mitra distribusi beras SPHP per 1 Mei 2024 beras SPHP per karung dijual sebesar Rp. 62,500/kg dari sebelumnya Rp. 54.500/kg.
 4. Pelaksanaan koordinasi dengan TPID kabupaten/kota dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan tetap dilakukan dengan menyelenggarakan Rakor se Sumsel, dan aktif dalam rapat mingguan dengan TPIP, sehingga informasi mengenai kondisi inflasi dan IPH secara keseluruhan di daerah kab/kota dapat dipantau dan dapat ditindaklanjuti dengan rakor teknis dengan pemerintah daerah kab/kota yang secara tidak langsung/zoom meeting bila ada kondisi yang penting seperti adanya daerah kabupaten/kota yang mempunyai IPH komoditi penting yang nilainya tinggi sehingga dapat langsung dikoordinasikan dan ditindaklanjuti.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Operasi Pasar maupun Pasar Murah perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan, dan menjaga daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok. Khususnya di Triwulan III adalah menjaga stabilitas harga pada komoditi beras akibat adanya penyesuaian HET beras dan mengantisipasi kondisi iklim panas dan cuaca yang masih panas ekstrim. Pemerintah Daerah Provinsi tetap perlu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota, distributor/produsen sembako antara lain Beras, Minyak Goreng, Gula, telur, BUMN, BUMS dan pihak lainnya yang dianggap penting, dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan komoditi.
2. Pelaksanaan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dalam rangka menjaga ketersediaan Pangan yang berkelanjutan menjadi salah satu yang diupayakan agar mengubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penjual, sehingga harapan stock/ketersediaan pangan ada tersedia disekitar masyarakat itu sendiri secara sehingga terkendalinya inflasi dengan strategi ketersediaan stok di masyarakat itu sendiri. Program GSMP perlu terus ditindaklanjuti dan disosialisasikan ke dalam masyarakat termasuk di areal perkantoran maupun sekolah.
3. Peran Serta aktif dari TPID Provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi daerah, dan meningkatkan koordinasi antar TPID sehingga terwujudnya sinergi antar pemerintah daerah, instansi vertikal yang tergabung dalam TPID.
4. Pelaksanaan koordinasi antar anggota TPID Provinsi, TPID kabupaten/kota dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan tetap dilakukan dengan salah satunya menyelenggarakan Rakor se Sumsel, dan aktif dalam rapat mingguan dengan TPIP, sehingga informasi mengenai kondisi inflasi IPH secara keseluruhan di daerah kab/kota dapat dipantau dan dapat ditindaklanjuti dengan segera.